KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Soal biaya haji, komisi VIII berikan catatan konstruktif
Tanggal : Minggu, 11 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Soal Biaya Haji

Komisi VIII Berikan Catatan Konstruktif



FOTO: DPR.GO.ID

Lisda Hendrajoni

SENAYAN menyambut baik kebijakan Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 3,2 juta per jemaah dalam Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2027. Sehingga setiap calon jemaah haji 2027 hanya membayar pelunasan sebesar Rp 23.048.825.

Anggota Komisi VIII DPR Lisda Hendrajoni mengatakan, subsidi Pemerintah tersebut memberikan keringanan nyata bagi calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji 2027. Kebijakan ini sangat berarti karena secara langsung meringankan beban pelunasan yang harus ditanggung jemaah.

"*Alhamdulillah*, ini menjadi kabar baik bagi calon jemaah haji kita. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo atas subsidi Pemerintah sebesar Rp 3,2 juta bagi jemaah haji," puji Lisda di Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Sebelumnya, Komisi VIII DPR bersama Pemerintah resmi mengetuk palu kesepakatan BPIH Tahun 1448 H/2027 M dalam rapat panitia kerja (panja) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2026). Hasilnya, BPIH ditetapkan sebesar Rp 98.466.351,35. Sementara komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang menjadi tanggungan jemaah sebesar Rp 54.648.825, sedangkan Rp 43.817.526,35 bersumber dari Nilai Manfaat.

Setelah memperhitungkan setoran awal sebesar Rp 25 juta dan saldo nilai manfaat pada rekening virtual masing-masing jemaah, rata-rata pelunasan berada pada angka Rp 26.248.825. Kemudian subsidi Pemerintah sebesar Rp 3,2 juta membuat beban biaya menjadi Rp 23.048.825 per jemaah atau sekitar Rp 23,05 juta. Angka pelunasan tahun ini turun sekitar Rp 3,2 juta hingga Rp 3,4 juta jika dibandingkan dengan biaya pelunasan pada 2026 yang berada di kisaran Rp 26,4 juta.

Lisda melanjutkan, kebijakan tersebut menunjukkan upaya Pemerintah bersama DPR untuk mencari formulasi penyelenggaraan haji yang semakin terjangkau bagi masyarakat tanpa mengurangi kualitas layanan. Karena itu, Komisi VIII DPR akan terus mengawal agar keringanan biaya ini tetap diiringi dengan pelayanan haji yang semakin baik, aman dan nyaman.

Lisda menambahkan, keringanan tersebut sangat berarti mengingat jemaah Indonesia umumnya harus menunggu selama bertahun-tahun sebelum mendapatkan kesempatan berangkat menunaikan ibadah haji. Ketika waktunya tiba, tentu mereka ingin beban yang mereka keluarkan semakin ringan. "Ini yang terus kita perjuangkan bersama," tandas politisi Nasdem ini.

Namun demikian, Lisda menegaskan, penurunan beban biaya jemaah tidak boleh berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan ibadah haji. ■ PYB